

## COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR UNTUK PENGENTASAN KEMISKINAN DI DESA KOHOD

<sup>1</sup>Siti Yulyanah, <sup>2</sup>Riska Sarofah

<sup>12</sup> Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Tangerang,  
Jalan Perintis kemerdekaan I/33 Cikokol, Kota Tangerang Telp 021 55733252

e-mail : <sup>1</sup>[sitiyulyanah130@gmail.com](mailto:sitiyulyanah130@gmail.com), <sup>2</sup>[ika.sarofah@gmail.com](mailto:ika.sarofah@gmail.com)

### Abstrak

Pengelolaan wilayah pesisir di Indonesia perlu melibatkan berbagai stakeholder dalam proses pengambilan keputusan dan upaya mencapai tujuan bersama. Penelitian ini menganalisis bagaimana cara proses kolaborasi dalam pengelolaan wilayah pesisir khususnya di Desa Kohod, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang. Desa tersebut merupakan salah satu program Kampung Sejahtera yang digagas oleh Organisasi Aksi Solidaritas Era Kabinet Kerja (OASE). Permasalahan utama di Desa Kohod antara lain kemiskinan, pengangguran, dan kualitas sumber daya manusia. Upaya dalam menyelesaikan masalah tersebut dilakukan melalui pendekatan kolaboratif antara Pemerintah pusat, OASE, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah hingga Pemerintah Desa serta terjalinnya kerjasama dengan pihak swasta melalui CSR. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan kualitatif. Sumber data diperoleh melalui data primer dan data sekunder dalam bentuk observasi dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses kolaborasi antar stakeholder membuat Desa tersebut memiliki infrastruktur yang cukup memadai dan meningkatkan kemandirian desa melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat. Namun jika dilihat dari angka kemiskinan proses kolaborasi ini belum menghasilkan penurunan angka kemiskinan yang signifikan.

Kata kunci : Collaborative Governance, Desa Kohod, Wilayah Pesisir, Kemiskinan.

## COLLABORATIVE GOVERNANCE IN MANAGEMENT OF COASTAL AREAS FOR POVERTY ALLEVIATION IN KOHOD VILLAGE

### Abstract

Management of coastal areas in Indonesia needs to involve various stakeholders in the decision making process and efforts to achieve common goals. This research analyzes how the collaboration process in the management of coastal areas, especially in Kohod Village, Pakuhaji District, Tangerang Regency. The village became one of the Village Prosperous programs that was initiated by the Cabinet Work Era Solidarity Action Organization (OASE). The main problems in Kohod Village include poverty, unemployment, and the quality of human resources. Efforts in resolving these problems are carried out through a collaborative approach between the Central Government, OASE, the Provincial Government, the Regional Government to the Village Government as well as establishing cooperation with the private sector through CSR. The method used in this research is a qualitative approach. Sources of data obtained through primary data and secondary data in the form of observations and interviews. The results showed that the collaborative process between stakeholders made the village have adequate infrastructure and increased the independence of the village through community empowerment activities. However, if seen from the poverty rate, this collaborative process has not resulted in a significant reduction in the poverty rate.

**Keywords:** Collaborative Governance, Kohod Village, Coastal Areas, Poverty

## KONFERENSI NASIONAL ILMU ADMINISTRASI

## A. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan Negara Kepulauan dengan jumlah pulau yang mencapai 17.508 dan Panjang garis pantai kurang lebih 81.000 (Sardono, 2017). Indonesia juga merupakan Negara yang memiliki kekayaan sumber daya alam yang baik, berupa sumber daya alam daratan maupun laut. Dilihat dari letak geografis maka Indonesia ketergantungan dalam aspek laut dan wilayah pesisir dalam pembangunan dibidang ekonomi. Tetapi hingga saat ini Indonesia masih belum optimal dalam pembangunan ekonomi dibidang wilayah pesisir. Beattley, et al dalam (Sara, 2014) menjelaskan wilayah pesisir adalah wilayah dinamika yang saling berhubungan dimana daratan, air dan udara berinteraksi dalam keseimbangan yang mudah terganggu (*Fragile*) yang secara tetap dirubah oleh pengaruh alam dan manusia secara umum, wilayah pesisir sebagai wilayah pertemuan antara ekosistem darat, ekosistem laut, dan ekosistem udara yang saling bertemu dalam suatu keseimbangan yang rentan. Dilihat dari sumber daya laut dan potensi yang ada di wilayah pesisir seharusnya masyarakat pesisir hidup sejahtera, namun nyatanya masyarakat wilayah pesisir identik dengan kemiskinan. Kondisi sosiologi terkait dengan kemiskinan yang terjadi pada masyarakat wilayah pesisir ditunjukkan oleh data Bank Dunia yang menunjukkan 108,78 juta orang atau 49 persen dari jumlah penduduk Indonesia hidup dalam situasi kemiskinan. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) bahwa angka kemiskinan di Indonesia sebesar 34,96 juta orang atau 15,42 persen. Angka tersebut diperoleh berdasarkan ukuran garis kemiskinan ditetapkan sebesar 1,55 Dollar AS (Dewi, 2018).

Kemiskinan di wilayah pesisir perlu adanya program yang melibatkan beberapa *stakeholder* untuk mewujudkan masyarakat pesisir yang sejahtera. Kemiskinan adalah ketidakmampuan individu dalam memenuhi kebutuhan dasar minimal untuk hidup layak (Suharto, 2008). Garis kemiskinan adalah sejumlah rupiah yang diperlukan oleh setiap individu untuk dapat membayar kebutuhan makanan setara 2.100 kilo kalori per orang per hari dan kebutuhan non makanan yang terdiri dari perumahan, pakaian, kesehatan, pendidikan, transportasi, serta aneka barang dan

jasa lainnya (Hardini, 2011). Dengan demikian harus adanya kolaborasi antar pemerintah untuk pengentasan kemiskinan di wilayah pesisir.

Menurut (Ansell & Gash, 2007) Istilah *Collaborative governance* merupakan cara pengelolaan pemerintahan yang melibatkan secara langsung *stakeholder* diluar Negara, berorientasi konsensus, dan musyawarah dalam proses pengambilan keputusan kolektif, yang bertujuan membuat atau melaksanakan kebijakan publik serta program program publik. Maka dari itu peneliti meneliti tentang *collaborative governance* dalam pengelolaan wilayah pesisir di Desa Kohod pada program Kampung Sejahtera. Program Kampung Sejahtera adalah program yang di gagas oleh OASE (Organisasi Aksi Solidaritas Era Kabinet). OASE merupakan wadah untuk jejaring komunikasi dan koordinasi sehingga memudahkan seluruh anggotanya untuk secara bersama-sama melakukan serangkaian aktivitas yang berguna bagi masyarakat luas (OASE, 2017). OASE ini memiliki program untuk kejahteraan masyarakat Desa Pesisir.

Kabupaten Tangerang merupakan wilayah pesisir dibagian utara. Luas wilayah pesisir Kabupaten Tangerang adalah  $\pm 301,62 \text{ km}^2$  dan panjang garis pantainya 51 KM. Wilayah pesisir pantainya berada dibagian utara yang meliputi 7 kecamatan pantai yaitu, Kronjo, Mekar Baru, Mauk, Pakuhaji, Teluknaga, Kosmabi dan Sukadiri (Putri, 2018). Menurut ((DINSOS), 2017) angka kemiskinan 2017 yang tertinggi ditunjukkan pada kecamatan Pakuhaji sebesar 62329. Salah satu Desa yang memiliki potensi sumber daya cukup baik pada kecamatan tersebut yaitu Desa Kohod tetapi tingkat kemiskinan di desa tersebut lumayan tinggi. Berikut jumlah masalah kesejahteraan sosial di wilayah pesisir se Kabupaten Tangerang.

# KONFERENSI NASIONAL ILMU ADMINISTRASI

**Tabel 1.1**  
**Jumlah penyandang masalah**  
**kesejahteraan sosial menurut Kecamatan di**  
**Kabupaten Tangerang**

Nama Kecamatan	Jumlah Individu				TOTAL
	Desil 1 *)	Desil 2*)	Desil 3 *)	Desil 4 *)	
Kosambi	7484	8020	11573	6136	33213
Kronjo	9845	8006	11065	6766	35682
Mauk	9988	8579	14680	12369	45616
Mekar Baru	9944	6835	7514	3020	27313
Pakuhaji	17811	16706	20193	7619	62329
Sukadiri	4538	4845	8369	5633	23385
Teluknaga	16585	13600	17346	6971	54502

Sumber ((DINSOS), 2017)

Berdasarkan tabel diatas angka kemiskinan yang paling tinggi terdapat di Kecamatan Pakuhaji. Salah satunya antara lain Desa Kohod. Desa kohod merupakan Desa pesisir yang memiliki potensi sumber daya yang relatif tinggi, masyarakat Desa Kohod mencari rezeki dengan membuat mie laksa dan kelapa. Tetapi tingkat kemiskinan dan kesejahteraan masyarakatnya masih relative rendah. Desa tersebut masih kumuh, infratraktur masih kurang, MCK masih belum memadai, serta pemberdayaan masyarakat yang rendah. Dengan demikian itu Organisasi Aksi Solidaritas Era Kabinet Kerja (OASE Kabinet Kerja) membuat program kampung sejahtera di Desa Kohod ini dengan landasan atas gambaran Desa miskin (Anindyati, 2017). Dalam hal ini OASE memilih Desa Kohod untuk dijadikan Desa percontohan dalam program kampung sejahtera.

Desa Kohod merupakan Desa miskin yang ada di Kabupaten Tangerang, Desa Kumuh yang memiliki infrastruktur yang kurang memadai dan masyarakat Desa Kohod tidak bisa mengembangkan potensi sumber daya alam yang ada. Desa yang memilki jarak tidak jauh dari Bandara internasional Soekarno Hatta dan Ibukota Indonesia. Dengan adanya masalah tersebut pemerintah pusat, pemerintah daerah serta OASE membuat Program Kampung Sejahtera dengan tujuan untuk mengatasi kemiskinan di Desa Kohod, instansi tersebut berkolaborasi untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat Desa Kohod kearah yang lebih baik. Berdasarkan uraian permasalahan diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "*Collaborative Governance* Pengelolaan Wilayah Pesisir dalam Pengetasan Kemiskinan. *Collaborative Governance* merupakan proses dan struktur pengambilan keputusan dan manajemen

kebijakan publik yang melibatkan orang secara konstruktif melintasi batas-batas badan publik, tingkat pemerintahan, dan / atau ruang publik, swasta dan sipil untuk melaksanakan tujuan publik yang tidak bisa dicapai dicapai (Emerson, Nabatcha, & Balgoh, 2012) Dalam penelitian ini peneliti menggunakan indikator teori menurut (Ansell & Gash, 2007) yaitu *face to face, trust building, commitment to proses, share undesting* dan *intmediante outcame*.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, Menurut Denzin dan Lincoln dalam (Moleong, 2014) metode kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar ilmiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada untuk menjelaskan bagaimana proses kolaborasi dalam pengelolaan wilayah pesisir di Desa Kohod ini. Adapun data yang digunakan bersumber dari dokumen OASE dan perencanaan pembangunan Kabupaten Tangerang serta indicator kemiskinan di Kabupaten Tangerang

## B. PEMBAHASAN

### Profil Desa Kohod

Desa Kohod merupakan salah satu Desa dengan kondisi terletak di Daerah pesisir Kecamatan Pakuhaji Kabupaten Tangerang. Luas wilayah Desa kohod yaitu 800 Ha atau 80.000 km<sup>2</sup> dengan jumlah penduduk sebanyak 8.755 jiwa (Kohod, 2015). Adapun kepadatan penduduknya sebanyak 0,11 jiwa/ km<sup>2</sup>. Desa ini secara tipologi adalah persawahan, perladangan, perkebunan, dan nelayan. Berdasarkan letaknya, sebelah utara Desa Kohod berbatasan dengan Laut Jawa, sebelah Selatan yaitu Desa Kali Baru, sebelah Barat yaitu Desa Kramat dan sebelah Timur Desa Tanjung Burung. Jumlah penduduk yang tidak bekerja mencapai 21,37% dari total penduduk yang bekerja. Angka pengangguran yang cukup tinggi tersebut menjadi permasalahan yang harus diselesaikan oleh para pengaku kepentingan, instansi maupun non instansi. Masyarakat desa Kohod juga memiliki potensi penghasil kelapa dan mie laksa meskipun memiliki potensi kelapa dan mie laksa cukup besar, tetapi angka kemiskinan, pengangguran dan lingkungan yang kumuh masih menjadi permasalahan utama Desa Kohod.

# KONFERENSI NASIONAL ILMU ADMINISTRASI

Proses *Collaborative Governance* dalam pengelolaan wilayah pesisir di Desa Kohod

Proses kolaborasi pada pengelolaan wilayah pesisir di Desa kohod adalah bagian yang paling penting sesuai dengan masalah yang ada di lapangan dan indikator pada penelitian ini. Sehingga peneliti mengembangkan indikator berdasarkan teori menurut (Ansell & Gash, 2007) yaitu *face to face*, *trust building*, *commitment to proses*, *share understanding* dan *intmediante outcame*. Proses kolaborasi antar *stakeholder* dalam pengelolaan wilayah pesisir untuk pengentasan kemiskinan di Desa Kohod ini sesuai dengan indikator peneliti. Dijelaskan kondisi awal Desa Kohod merupakan suatu permasalahan kawasan kumuh dan kemiskinan seringkali permasalahan diseputar pinggiran Kota. Salah satu kawasan pinggiran Kota yang memiliki kompleksitas permasalahan kumuh dan kemiskinan adalah Desa Kohod Kecamatan Pakuhaji. Permasalahan kemiskinan yang terjadi di Desa Kohod juga didukung dengan minimnya kondisi perumahan dan PSU pendukung yang sesuai dengan standar kualitas seperti sarana sanitasi, akses air, dan jalan lingkungan. Pelaksanaan pengentasan kemiskinan di Kabupaten Tangerang dilaksanakan melalui berbagai program pembangunan Daerah seperti Gerbak pakumis, Gerbang Mapan, Desa terpadu pada kemiskinan, program 1000 jamban serta program pembanguna Daerah lain.

Namun nyatanya, program yang dibuat oleh Pemerintah Daerah belum sepenuhnya merata, sehingga masyarakat yang memiliki akses pedalaman seperti Desa Kohod ini belum adanya program pembangunan dari Pemerintah Daerah. Maka, OASE membuat gagasan atau ide untuk Desa kohod dijadikan sebagai sasaran Programnya. OASE berkoordinasi dengan beberapa Kementerian dan Pemerintah Provinsi serta Pemerintah Daerah untuk melaksanakan Program Kampung Sejahtera. Program Kampung Sejahtera ada beberapa Lembaga yang memiliki peran dalam proses Program Kampung Sejahtera ini, tetapi OASE merupakan oarganisasi yang memiliki peran aktif sebagai penggagas dan pelaksana untuk pengentasan kemiskinan Desa Kohod.

Indikator pertama yaitu *face to face*, menurut (Ansell & Gash, 2007) *face to face* merupakan Semua bentuk *Collaborative Governance* dibangun dari dialog tatap muka secara langsung dari tiap *stakeholder* yang terlibat. Sebagaimana *Collaborative Governance*

yang berorientasikan proses, dialog secara langsung sangat penting dalam rangka mengidentifikasi peluang dan keuntungan bersama. *Face to face* dalam program Kampung Sejahtera ini dilakukan dengan dua cara yaitu secara formal dan informal. *Face to face* secara formal biasanya dengan rapat-rapat koordinasi antar *stakeholder*. Rapat kordinasi ini wajib dihadiri oleh pihak kalaborasi yaitu Kementerian, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa dan Masyarakat serta pihak swasta, tetapi pihak swasta tidak terlalu terlibat langsung dalam program ini karena OASE hanya berkoordinasi dengan pemerintah dan masyarakat. Rapat yang dilaksanakan secara formal biasanya bertempat di kantor OASE maupun di BAPPEDA Kabupaten Tangerang. Dalam pertemuan formal ini ada beberapa yang disampaikan yaitu maksud dan tujuan forum dibentuk dan menyerap aspirasi dari semua pihak kalaborasi. Semua kebutuhan desa dan kebutuhan masyarakatnya pun dibahas dalam forum ini. Komunikasi yang dibangun dalam hal ini menyangkut tahap perencanaan, tahap pelaksanaan dan tahan evaluasi.

*Trust building*, menurut (Ansell & Gash, 2007) *trust building* merupakan membangun kepercayaan perlu dilakukan sesegera mungkin ketika proses kolaborasi pertama dilakukan. Hal ini diupayakan agar para *stakeholder* tidak mengalami egosentrisme antar institusi. Oleh karenanya, dalam membangun kepercayaan ini, diperlukan pemimpin yang mampu menyadari akan pentingnya kolaborasi, yang dimaksud dalam penelitian disini adalah Setiap *stakeholder* membangun kepercayaan dengan melakukan atau membuat keputusan dan membuat perjanjian bersama dengan visi-misi yang sama. Selain itu, *trust building* dalam *collaborative governance* program Kampung Sejahtera dibuktikan dengan adanya *role sharing*

**Tabel 1.2 Role Sharing Pelaksana Program Kampung Sejahtera**

1	OASE	Mendukung dan monitor pelaksanaan Kegiatan-kegiatan Kampung Sejahtera
2	Kementrian/Lembaga	Mengalokasikan kegiatan dan anggaran Kampung Sejahtera sesuai dengan Tugas dan Fungsi Kementrian dan Lembaga Masing-masing
3	Kementrian Dalam Negeri	Mengalokasikan kegiatan dan anggaran Kampung Sejahtera sesuai dengan tugas dan Fungsi kementrian dan Lembaga masing-masing serta mengakomodir pelaksanaan Pembangunan Kampung Sejahtera
4	Pemerintah Provinsi dan Kabupaten	Mengalokasikan kegiatan dan anggaran Program Kampung SKPD masing-masing serta menyusun Master Plan pelaksanaan Kampung Sejahtera

Sumber, Masterplan 2016

*Commitment to proses*, menurut (Ansell & Gash, 2007) bahwa Komitmen yang kuat dari



# KONFERENSI NASIONAL ILMU ADMINISTRASI

setiap *stakeholder* diperlukan untuk mencegah resiko dari proses kolaborasi. Meskipun komitmen memang merupakan hal yang rumit dalam kolaborasi. Komitmen ini berawal pada penyusunan perumusan kebijakan atau program secara bersama-sama oleh *stakeholder* yang terlibat kolaborasi pada program Kampung Sejahtera ini. Komitmen yang dilakukan oleh OASE, Kementerian, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, Masyarakat serta pihak swasta berawal dari penyusunan master plan. Master plan itu sendiri merupakan proses awal yang dilakukan oleh BAPPEDA Kabupaten Tangerang, master plan dibuat dengan tujuan untuk perencanaan Program Kampung Sejahtera ini bisa berorientasikan pada visi misi bersama.

*Share understanding*, menurut (Ansell & Gash, 2007) *share understanding*, bahwa , *stakeholder* yang terlibat harus saling berbagi pemahaman mengenai apa yang dapat mereka (*stakeholder*) capai melalui kolaborasi yang dilakukan. Saling berbagi pemahaman ini dapat digambarkan sebagai misi bersama, tujuan bersama untuk memaknai dan mengartikan suatu masalah. yang dimaksud di dalam *indicator* yang keempat, ini bahwa rasa saling memahami antar *stakeholder* ini bisa dilakukan dengan rapat koordinasi antar pihak terkait, dengan diadakannya rapat koordinasi yang membahas permasalahan permasalahan dilapangan atau permasalahan lainnya bisa dituangkan dalam rapat koordinasi ini, maka akan tumbuh sikap saling memahami antar *stakeholder*.

*Intermediate outcome*. (Ansell & Gash, 2007) *intermediate outcome* merupakan Hasil lanjutan dari proses kolaborasi terwujud dalam bentuk output atau keluran yang nyata. Hal ini merupakan hasil proses yang kritis dan esensial dalam mengembangkan momentum yang dapat membimbing demi keberhasilan suatu kolaborasi. *Intermediate outcomes* ini muncul apabila tujuan yang mungkin dan memberikan keuntungan dari kolaborasi yang mana secara relative konkrit dan ketika "*small wins*" Dari suatu kolaborasi dapat dimungkinkan terjadi. Hasil dari program Kampung Sejahtera ini adalah pemberdayaan masyarakat yang sudah membaik serta kemiskinan sudah berkurang karena masyarakat diberikan pelatihan dalam hal usaha atau pemberdayaan, serta insfrstrukturpun sudah cukup baik. Salah satu hasil dari program pemberdayaan adalah KURAJU (Kerupuk telur rajungan), sabun, serta memanfaatkan lahan kosong menjadi lahan

pertanian. Selain pemberdayaan proses kolaborasi ini juga berfokus pada pembangunan infsatraktur dibidang kesehatan, pendidikan, prasarana umum, dan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).

Sejauh ini *intermediate outcome* dari *collaborative governance* dalam program ini dapat dikatakan berhasil. Hal ini karena adanya alur koordinasi yang jelas dan komunikasi yang baik serta komitmen yang erat diantara aktor kolaborasi dalam mencapai tujuan dari program Kampung sejahtera ini. Keberhasilan ini juga didukung oleh komitmen aktor kolaborasi dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing masing. Tetapi dalam hal pengentasan kemiskinan yang dilakukan oleh *stakeholder* belum optimal kerana karena penurunan angka kemiskinan di Kecamatan ini belum signifikan.

## C. PENUTUP DAN REKOMENDASI

### Kesimpulan

Proses *collaborative governance* dalam pengelolaan wilayah pesisir untuk pengentasan kemiskinan di Desa Kohod ini dengan adanya program Kampung Sejahtera, dimana program ini merupakan program yang digagas oleh OASE dengan berkolaborasi dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, maupun Pemerintah Daerah. Program ini bertujuan untuk pengentasan kemiskinan di Desa Kohod. Saat ini Desa Kohod merupakan Desa percontohan Desa yang kaya akan sumber daya alam. pemberdayaan masyarakat yang sudah membaik serta kemiskinan sudah berkurang karena masyarakat diberikan pelatihan dalam hal usaha atau pemberdayaan, serta insfrastrukturpun sudah cukup baik.

### Rekomendasi

- 1 Tingkatannya kualitas sumber daya manusia di Desa Kohod, dengan diberikannya pelatihan, pembinaan tidak hanya ada program ini saja masyarakat desa Kohod diberikan pelatihan tetapi programnya yang bersifat berkelanjutan atau jangka waktu yang panjang sesuai dengan potensi yang ada di Desa Kohod;
- 2 Diadakannya pengawasan secara berkelanjutan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di Desa Kohod dalam program pengentasan kemiskinan di Desa Kohod dapat dirasakan dengan optimal.

# KONFERENSI NASIONAL ILMU ADMINISTRASI

- 3 Belum optimalnya proses *intermediate outcome* dalam kolaborasi karena masih adanya masyarakat yang miskin belum sepenuhnya bisa mengatasi pengentasan kemiskinan di Desa Kohod.
- 4 Pentingnya melibatkan swasta dalam hal koordinasi dengan OASE.
- D. REFERENSI**
- (DINSOS), D. S. (2017). *BDTPPFM (Basis Data Terpadu Program Penangan Fakir Miskin)*. Tangerang: Dinas Sosial Kabupaten Tangerang.
- Anindyati, H. (2017). *Kementrian PURP Wujudkan Kampung Sejahtera di Desa Kohod*. Jakarta: Liputan6.
- Ansell, C., & Gash, A. (2007). Collaborative Governance in Theoty and Practice. *Jurnal of Public Administration Reesearch and Theory*.
- BAPPEDA. (2016). *Laporan Akhir Desa Kohod*. Tangerang: Bappeda.
- BPS. (2015, Mei 16). *Badan Pusat Statistik Kabupaten Tangerang*. Retrieved from Analisi dan Perhitungan Tingkat Kemiskinan Tahun 2015.
- Dahuri, R., Rais, J., Ginting, S. P., & Sitepu, M. (2001). *Pengelolaan Sumberdaya Wiyalah Pesisir dan Lautan secara Terpadu*. Jakarta: PT Pradnya Paramita.
- Dewi, A. A. (2018). Model Pengelolaan wilayah Pesiisr Berbasis Masyarakat : Community Based Development. *Jurnal Penelitian Hukum*, Vol 18 No 2 Juni.
- Dwiyanto, A. (2015). *Manajemen Pelayanan Publik : Peduli, Inklusif dan Kolaboratif*. Yogyakarta: UGM Press.
- Emerson, K., Nabatcha, T., & Balgoh, S. (2012). An intergrative Framework for Collaborative Governance. *Jounal of Public Administration Rezearch and Theory*.
- Fadli, Y., & Nurlukman, A. D. (2018). Kolaborasi Pemerintah dalam Pembangunan Terpadu Wilayah Pesisir di Kabupaten Tangerang Melalui Gerakan Pembangunan Masyarakat Pantai (Gerbang Mapan). . *Prosiding Seminar Nasional Unimus*, Volume 1.
- Hardini. (2011). *Hubungan Antara Pertumbuhan Penduduk, Kemiskinan dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kualitas Lingkunga di KotaSemarang*. Skripsi.
- Kohod, D. (2015). *Profil Desa Kohod*. Tangerang.
- Moleong. (2014). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- OASE. (2017). *oasekabinetkerja*. Retrieved November 05, 2018, from <http://oasekabinetkerja.org>
- Putri, A. A. (2018). *Pengeoloaan Wilayah Pesisir di Desa Muara Kecamatab Teluk Naga Kabupaten Tangerang*. Serang: Universitas Sultan Ageng Tirtasaya.
- Sadono, E. D. (2017). Desentralisasi dan Pengelolaan Wilayah Pesisir di Indonesia Studi Pada Desa Kohod Kecamatan Pakuhaji Kabupaten Tangerang. *Jurnal Kawistara*, Vol 7 No 3, 22 Desember 2017.
- Sara, L. (2014). *Pengelolaan Wilayah Pesisir*. Bandung: Alfabet.
- Sardono, E. D. (2017). Desentralisasi dan Pengelolaan Wilayah Pesisir di Indonesia Studi Pada Desa Kohod Kecamatan Pakuhaji Kabupaten Tangerang. *Jurnal Kawistara*, Vol 7 No 03, 22 Desember 2017.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Suharto. (2008). *Pendampingan Sosial dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin*. Retrieved from Konsep dan Stategi: [http://www.policy.hu/suharto/modul\\_32.html](http://www.policy.hu/suharto/modul_32.html)